



Banjir Kabupaten Sintang Tahun 2021 : Fakta dan Dampaknya Serta Kebijakan Mitigasi Bencana

Wida Novianti

ITTEKes Muhammadiyah Pontianak Kalimantan Barat

Cau Kim Jiu

ITTEKes Muhammadiyah Pontianak Kalimantan Barat

Alamat: Jl. Sungai Raya Dalam II, Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat
78117

Korespondensi penulis: widanovia90@gmail.com

Abstract : *West Kalimantan has the longest river in Indonesia, namely the Kapuas River, where every year there is a potential for flood disaster in almost every district and city area that it passes through. The biggest flood in the last 20 years occurred in 2021, based on West Kalimantan BPBD data, 140,468 residents were affected by the flood and 2 residents were reported to have died in Sintang Regency. The flood disaster that occurred attracted enough public attention at the national level. The Central Government and its staff were also present to deal with the flood. The potential for similar floods is very likely to occur, requiring serious efforts to mitigate similar flood disasters from recurring. Method for preparing this article using a qualitative method with an exploratory approach. It is hoped that the results of this research can provide input in understanding conditions, dealing with them and making efforts to prevent and deal with similar flood disasters in Sintang Regency..*

Keywords: *Disaster, Flood, Sintang, Mitigation, Impact*

Abstrak : Kalimantan Barat memiliki Sungai Terpanjang di Indonesia yaitu Sungai Kapuas, dimana setiap tahunnya menjadi potensi Bencana banjir hampir disetiap wilayah kabupaten Kota yang dilaluinya. Banjir Terbesar dalam 20 tahun terakhir terjadi pada tahun 2021 yang lalu, berdasarkan data BPBD Kalimantan Barat, warga yang terdampak banjir sejumlah 140.468 jiwa dan 2 warga dilaporkan meninggal dunia di Kabupaten Sintang. Bencana banjir yang terjadi cukup menyita perhatian public sampai ketinggian Nasional. Pemerintah Pusat beserta jajarannya turut hadir untuk mengatasi banjir tersebut. Potensi Banjir yang serupa sangat mungkin terjadi perlu upaya serius upaya mitigasi bencana banjir serupa terulang. Metode Penyusunan Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan dalam memahami kondisi, mengatasi serta melakukan upaya – upaya pencegahan dan penanggulangan bencana banjir yang sama di Kabupaten Sintang.

Kata Kunci : Bencana, Banjir, Sintang, Mitigasi, Dampak

LATAR BELAKANG

Pada bulan November 2021, Kabupaten Sintang mengalami banjir terbesar dan terlama sejak tahun 1963. Banjir yang merendam kabupaten tersebut selama 4 minggu menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai penyebabnya. Presiden Joko Widodo mengaitkan penyebab utama bencana banjir tersebut dengan kerusakan lingkungan di kawasan hulu sungai sehingga mengganggu penangkapan air hujan. Penilaian ini juga diamini oleh para aktivis lingkungan hidup yang berpendapat bahwa banjir merupakan dampak dari berbagai kerusakan alam di Kalimantan Barat yang berdampak pada lima wilayah berbeda. (Ferryanto, 2021).

Terjadinya kondisi krisis iklim yang ditandai dengan anomali cuaca ekstrem telah menimbulkan serangkaian bencana ekologi antara lain banjir, tanah longsor, angin puting

beliung, serta kebakaran hutan dan lahan. Bencana-bencana ini menjadi lebih sering dan parah, sehingga menimbulkan keadaan darurat ekologis. Meskipun demikian, ekstraksi sumber daya alam terus tidak terkendali, tanpa adanya penegakan hukum yang memadai untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memulihkan kerusakan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, dalam mengkaji bencana banjir di Sintang, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya curah hujan yang tinggi tetapi juga dampak penggundulan hutan dan sedimentasi yang diakibatkannya pada Sungai Kapuas.

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Sintang, sebanyak 124.497 jiwa yang berada di 12 kecamatan terdampak menjadi korban banjir di Kabupaten Sintang. Ketinggian air banjir berkisar antara 100 hingga 300 cm (Ramdhani, 2021). Untuk memenuhi kebutuhan makan dan minuman para korban banjir tersebut, Pemerintah Kabupaten Sintang bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Sintang mendirikan 36 dapur umum yang tersebar di 12 kecamatan terdampak. Inisiatif ini dilakukan dengan tetap memastikan kepatuhan ketat terhadap protokol kesehatan, dengan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung. Selain itu, PT PLN (Persero) UP3 Sanggau menerapkan strategi pemadaman listrik secara sistematis untuk memitigasi dampak parah banjir, seperti gangguan listrik dan potensi risiko warga terkena sengatan listrik.

Banjir di Kabupaten Sintang pun menarik perhatian pemerintah pusat. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan langkah jangka pendek dan jangka panjang yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Sebagai penanganan jangka pendek, menteri PUPR akan melakukan pengukuran dan memasang geobag di wilayah yang terkena dampak paling parah seperti pusat keuangan kota. Pada saat yang sama, pemerintah sedang menyusun rencana induk pengelolaan jangka panjang penanganan banjir di wilayah sungai Kapuas dan Melawi, termasuk pengerukan dan restorasi danau (retarding basin) (Rosyadi, 2021).

Pemasangan Geobog sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan pada tingkat pengelolaan wilayah. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengaku tidak menyetujui rencana Kementerian PUPR untuk membuat geobag jika terjadi banjir jangka pendek. Ia berpendapat bahwa untuk mengatasi banjir, sungai Kapuas harus diperdalam agar lebih banyak menerima air hujan (Ruhullessin, 2021). Kepala BPBD Kabupaten Sintang Bernhad Saragih juga meminta Direktur Jenderal Sumber Daya Air Satgas Khusus Kementerian PUPR untuk mengkaji lebih lanjut rencana pembangunan tanggul dengan menggunakan geobag agar tidak menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat (Jamadin, 2021).

Penjelasan di atas menegaskan bahwa pertimbangan politik merupakan hal yang penting dalam mitigasi dan penanganan bencana banjir di Kabupaten Sintang. Apalagi

permasalahan banjir menjadi tugas banyak lembaga dan pemerintah daerah, termasuk kepentingan pemerintah pusat. Mengutip pernyataan Zenzi Suhad, Direktur Penelitian Kebijakan Lingkungan dan Bantuan Hukum WALHI (Dewi, 2021), menjelaskan bencana banjir ada dua penyebabnya, yaitu faktor alam seperti hujan lebat atau kelalaian manusia melindungi lingkungan, yang menyebabkan penyumbatan aliran air. Selain itu, kurangnya pengambilan keputusan yang baik dalam melakukan mitigasi dan mengatasi permasalahan banjir juga menjadi penyebab terjadinya banjir.

Kompleksnya permasalahan banjir di pemerintahan Sintangi membuat penyelesaiannya memerlukan komitmen beberapa pihak, antara lain Pemerintah Daerah Kapuas Hulu dan Pemerintah Daerah Melawi. Sebab, banjir di Kabupaten Sintang juga merupakan banjir dari hulu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk bertindak bersama dan bekerja sama dalam membentuk kebijakan mitigasi dan pengelolaan banjir di masa depan. Konsisten dengan konsep inti pengelolaan kolaboratif (Ansell dan Gash, 2007) yang menjelaskan bahwa lembaga pemerintah secara langsung mengundang pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan konsensus dalam mengambil atau melaksanakan kebijakan publik.

METODE

Masalah yang dibahas dalam artikel ini adalah bencana Banjir tahun 2021 di Kabupaten Sintang yang mengakibatkan berbagai dampak negative seperti dampak social, lingkungan dan kesehatan. Bencana Banjir tahun 2021 merupakan banjir terbesar di Kabupaten Sintang dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi potensi banjir besar pada tahun – tahun berikutnya. Tujuan pembuatan artikel ini untuk mengetahui tentang Fakta dan Dampaknya Serta Kebijakan Mitigasi Bencana banjir di Kabupaten Sintang. Teknik pengumpulan data meliputi pengumpulan data dan informasi sekunder dari sumber penelitian dan jurnal akademik serta penambahan referensi artikel yang meliputi bencana banjir. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan berbagai studi literatur dan studi kepustakaan serta jurnal akademik. (Jumliani, 2021). Dalam menganalisis data dalam suatu artikel disajikan data argumen dan kesimpulan yang diambil dari hasil analisis sumber-sumber ilmiah yang isinya membahas masalah bencana Banjir Fakta dan Dampaknya Serta Kebijakan Mitigasi Bencana banjir di Kabupaten Sintang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kompleksitas Permasalahan Banjir

Banjir di Kalimantan Barat menjadi bencana tahunan yang selalu melanda hampir diseluruh wilayah kabupaten/kota. Pada tahun 2021 yang lalu, merujuk pada data BPBD Kalimantan Barat, disebutkan warga yang terdampak banjir sejumlah 140.468 jiwa dan 2 warga dilaporkan meninggal dunia di Kabupaten Sintang, 8.714 jiwa di Kabupaten Kapuas Hulu, dan 725 warga Kabupaten Sekadau. Bahkan banjir di Kabupaten Sintang menjadi yang banjir terbesar dan terlama sejak 1963 atau 58 tahun yang lalu (Cipta, 2021). Bencana banjir tersebut yang kemudian membuat perekonomian pada sejumlah wilayah menjadi terhenti, termasuk menghambat kegiatan Pendidikan, pemerintahan, dan pelayanan Kesehatan.

Jika melihat faktor penyebabnya, selain faktor alamiah seperti tingginya curah hujan, atau juga pengaruh pasang air laut, namun banjir di Kalimantan Barat juga sangat dipengaruhi oleh tindakan manusia yang banyak melakukan aktifitas perekonomian di kawasan hutan dan sungai di Kalimantan Barat. Aktivitas perekonomian tersebut yang kemudian banyak menyebabkan perubahan pada lingkungan. Mulai dari rusaknya drainase lahan, rusaknya bangunan pengendali banjir, termasuk rusaknya hutan karena maraknya penambangan emas tanpa izin (PETI), termasuk alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit ataupun perumahan.

Dalam pengamatannya, Kepala BPBD Kabupaten Sintang melihat penyebab bencana banjir yang terjadi di Kalimantan Barat, terutama di Kabupaten Sintang. Ia menyebutkan bahwa ada beberapa penyebab bencana banjir di Kabupaten Sintang, *pertama*, tingginya aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Sintang di daerah Sungai. *Kedua*, tingginya aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan hutan sehingga pada saat hujan deras hutan yang tidak lagimampu menampung tingginya curah hujan, termasuk banyaknya material sisa aktivitas perekonomian tersebut ikut mengalir bersama lumpur masuk ke sungai, sehingga sedimentasi sungai menjadi tinggi. *Ketiga*, hilangnya pohon-pohon disekitaran daerah aliran sungai (DAS). *Keeempat*, termasuk faktor cuaca, tingginya curah hujan, dan juga anomaly air. Dan yang *kelima*, air dari hilir tidak mengalir dengan lancar karena sungaidi hilir juga mengalami pendangkalan yang sama, sehingga air tidak dapat mengalir kelaut. Walaupun sebelumnya pernah dilakukan pengerukan, namun saat ini upaya tersebut tidak lagi dilakukan dan mengakibatkan banjir di wilayah atas (Kapuas

Hulu, Sintang, Melawi, dan Sanggau) menjadi lebih lama dari biasanya.

Terkait dengan deforestasi hutan, merujuk pada riset *Global Forest Watch*, dalam dua dekade terakhir 2002-2020, memperlihatkan, hutan primer Kalbar sudah hilang sekitar 1,25 juta hektar (Pahlevi 2021). Kalimantan Barat sendiri memiliki 6,88 juta hektar hutan primer (47%) dari total luasan wilayah 14,9 juta hektar. Dalam 2020 saja, Kalimantan Barat telah kehilangan 32.000 hektar hutan primer setara 23 juta ton emisi CO₂. Masih merujuk hasil riset yang sama, Analisis Yayasan Auriga menyebutkan bahwa Kalimantan Barat memiliki perkebunan sawit dengan luasan 1,89 juta hektar, dimana 189.121 hektar masuk dalam kawasan hutan.

Pertanyaanya adalah, apakah ada korelasi antara bencana banjir disuatu wilayah dengan meningkatnya alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Pertanyaan tersebut kerap menjadi perdebatan Ketika bencana banjir terjadi di wilayah-wilayah yang menjadi sentra perkebunan kelapa sawit. Bahkan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji melalui unggahan pada akun Facebooknya dengan tegas mengatakan bahwa perkebunan kepala sawit memiliki andil dalam terjadinya bencana banjir di Kalimantan Barat. Gubernur Sutarmidji juga menyoroti sikap apatis pihak perusahaan Ketika diminta bantuan dalam penanganan bencana banjir dengan dalih perusahaan mereka tidak berada di wilayah terdampak banjir.

Sementara itu, dalam situs resminya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) punya pendapat berbeda. Mereka menilai fenomena bencana banjir merupakan bagian dari perubahan iklim yang terjadi hampir diseluruh negara di dunia, dan tidak ada kaitannya dengan keberadaan perkebunan sawit. Dengan merujuk pada data BNPB, GAPKI menyatakan bahwa peningkatan intensitas bencana banjir nasional selama 2002 hingga 2012, 37 persen justru terjadi di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Dan ketiga provinsi tersebut bukanlah merupakan sentra perkebunan kelapa sawit seperti Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan. Dari analisis tersebut, GAPKI kemudian menyimpulkan bahwa fenomena bencana banjir merupakan bagian dari perubahan iklim dan dapat melanda setiap provinsi di Indonesia. Dan tidak ada kaitannya dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit dan justru lebih sering terjadi di provinsi yang tidak memiliki perkebunan kelapa sawit (GAPKI 2016).

Dari sisi pemerintah, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa banjir di Kabupaten Sintang disebabkan dua faktor. *Pertama*, intensitas hujan ekstrem yang melanda kawasan hulu Kalimantan Barat, termasuk Kabupaten Sintang. *Kedua*, bencana

banjir di Kabupaten Sintang juga dikarenakan rusaknya daerah aliran sungai (DAS), termasuk masifnya kerusakan daerah tangkapan hujan atau *catchment area*. Fakta tersebut yang kemudian membuat pemerintah akan melakukan penghijauan di kawasan Sungai Melawi dan Sungai Kapuas, termasuk membangun area persemaian (*nursery*) di sekitar daerah aliran sungai. Namun dari pernyataan tersebut, Presiden Joko Widodo tidak menyinggung secara spesifik adanya ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat, termasuk Kabupaten Sintang.

Hal berbeda disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ia menilai bahwa pemerintah baik melalui kementerian kerap tidak jujur dalam menjelaskan penyebab utama terjadinya banjir yang melanda wilayah perhuluan Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Sintang. Pemerintah selalu menggunakan alasan curah hujan tinggi untuk menjelaskan penyebab banjir. Padahal jelas bahwa bencana banjir di Kabupaten Sintang tersebut lebih disebabkan deforestasi yang tidak terkendali yang dipergunakan untuk perkebunan dan kebutuhan lainnya (Santoso 2021).

Kalangan pemerhati lingkungan juga turut menyampaikan analisisnya terkait dengan terjadinya bencana banjir di Kabupaten Sintang. Mengutip pemberitaan CNN Indonesia (2021), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat melalui Hendrikus Adam selaku Kepala Divisi Kajian, Dokumentasi dan Kampanye menyatakan bahwa bencana banjir di Kabupaten Sintang tidak hanya disebabkan tingginya curah hujan. Pihaknya menilai bahwa bencana banjir di Kabupaten Sintang juga disebabkan hilangnya fungsi wilayah penyangga sebagai daerah resapan air. Memperkuat pernyataan Hendrikus Adam, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat Nicodemus Ale mengatakan bahwa kawasan tutupan hutan di Kabupaten Sintang selama 10 tahun terakhir telah berkurang menjadi 516 ribu hektar selama 10 tahun terakhir. Dan lebih banyak disebabkan oleh konsesi perusahaan, baik perkebunan kelapa sawit, dan juga pertambangan.

Hal senada disampaikan Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia Kiki Taufik yang merujuk pada data *primary humid tropical forest* (hutan primer tropis basah) yang dikeluarkan oleh University of Maryland (UMD). Dari data tersebut, Greenpeace menyebutkan bahwa secara keseluruhan hutan yang hilang di Kalimantan mencapai 4.089.132,8 hektare selama tahun 2001 hingga 2020. Luasan deforestasi tersebut berbanding lurus dengan bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kalimantan, termasuk

bencana banjir di Kabupaten Sintang. Sama seperti yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo yang mengakui bencana banjir di Kabupaten Sintang imbas dari kerusakan lingkungan di sekitar sungai di Kalimantan akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan.

Melihat perdebatan di atas, dapat kita simpulkan bahwa bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Sintang memang dikarenakan tingginya curah hujan yang terjadi di kawasan perhuluan Kalimantan Barat. Namun tentu saja fenomena tersebut tidak bisa dilepaskan dari kondisi lingkungan sudah kehilangan fungsinya, baik di kawasan daerah aliran sungai (DAS), hilangnya daerah tangkapan air (*catchment area*), dan juga hilangnya fungsi daerah penyangga sebagai serapan air.

2. Analisis Penanggulangan dan Mitigasi Bencana Banjir Kabupaten Sintang

Terlepas dari perdebatan tentang penyebab banjir di Kabupaten Sintang, perlu peneliti apresiasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dan jajarannya dalam penanggulangan bencana banjir yang sempat menjadi perhatian masyarakat luas. Pada bagian ini, peneliti tidak membuat pemisahan penjelasan terkait dengan penanggulangan dan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Sintang, namun disampaikan secara bergantian. Selain itu, secara bergantian akan menggunakan pendekatan kolaborasi pemerintahan dalam pandangan Ansell dan Gash, termasuk pendekata delapan item penting yang bisa dijadikan ukuran keberhasilan sebuah *network* atau kolaborasi dalam *governance* yang disampaikan oleh DeSeve.

Seperti yang disampaikan diawal, bahwa penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Sintang dapat disimpulkan sudah berjalan maksimal, terutama dalam penanganan kebutuhan dasar bagi korban bencana banjir, baik sandang, pangan maupun papan. Seluruh pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Sintang memiliki sumber daya dan kapasitas yang setara untuk berpartisipasi. Mulai dari level pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Bencana banjir di Kabupaten Sintang melanda 12 kecamatan, dan terparah terjadi di Kecamatan Sintang yang melanda hampir 1 bulan lamanya. Untuk mempermudah memberikan pelayanan kepada korban bencana banjir, BPBD Kabupaten Sintang membangun lima pos. Pos pertama sebagai pos induk berada di Kantor BPBD Kabupaten Sintang. Pos kedua berlokasi di Tugu Bambu Kuning Sungai Durian, pos ketiga berada di Simpang Lima, pos keempat di Tugu Bank Indonesia, dan yang terakhir berada di wilayah Sungai Ulak, Menyumbang. Kepala BPBD Kabupaten Sintang Bernhad Saragih menjelaskan bahwa kelima pos tersebut mengumpulkan informasi wilayah mana saja yang

butuh pertolongan dan evakuasi.

Disampaikan pula bahwa dalam penanganan bencana banjir, semua elemen bergerak bersama, baik pemerintah daerah, swasta dan juga masyarakat yang turut menunjukkan kepedulian dengan memberikan bantuan bagi korban bencana banjir. Bantuan tersebut yang kemudian di salurkan kepada korban yang terdampak banjir dengan pertanggungjawaban yang transparan antara pendistribusi dan juga pemerintah daerah. Terkait dengan pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang selalu melakukan patroli untuk melihat kondisi wilayah dan potensi penyakit menular yang diderita para korban bencana banjir.

Pada level provinsi, selain turut langsung meninjau lokasi bencana banjir, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji juga menginstruksikan jajarannya, terutama BPBD Provinsi Kalimantan Barat untuk berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Sintang dalam penanggulangan bencana banjir. Termasuk dengan terus mendistribusikan bantuan logistic dan juga obat-obatan untuk memenuhi kebutuhan korban bencana banjir di Kabupaten Sintang. Sedangkan pada level pusat, Menteri Sosial Tri Rismaharini juga turut datang ke lokasi banjir di Kabupaten Sintang serta mendistribusikan bantuan perahukaret ke Dinas Sosial dan juga membangun lumbung sosial di kecamatan berupa pangan dan sandang. Jadi setiap habis Kemensos akan mengirimkan kembali bantuan.

Selain itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono didampingi Ketua Komisi V DPR RI Lasarus juga turut mengunjungi Kabupaten Sintang untuk memantau kondisi banjir sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo. Dalam kunjungan tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melakukan kajian untuk mengambil langkah-langkah penanganan jangka pendek dan panjang. Untuk penanganan jangka pendek, Kementerian PUPR akan melakukan pengukuran dan pemasangan geobag di area terdampak parah bencana banjir (Ade 2021). Kementerian PUPR bakal menugaskan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan 1 dan PT. Wijaya Karya untuk mengerjakan proyek dengan anggaran 28 miliar tersebut. Dan segera bergerak karena BMKG memprediksi puncak hujan akan terjadi di sekitar Januari-Februari 2022. Sehingga dapat segera dibangun geobag yang kuat pada area yang tepat.

Sedangkan untuk jangka Panjang, pemerintah akan menyusun masterplan penanganan banjir wilayah Sungai Kapuas dan Melawi, termasuk mengeruk dan merehabilitasi danau-danau (retarding basin). Berdasarkan data BWS Kalimantan I Ditjen Sumber Daya Air, terdapat lebih dari 50 danau di sepanjang wilayah Sungai Kapuas. Selanjutnya pada tahun 2021 sedang dilakukan pengerukan 3 danau, dan dilanjutkan

dengan 7 danau pada 2022 sebagai retarding basin.

Merespon rencana pembangunan geobag tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji tidak menyetujui rencana Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun geobag sebagai penanganan bencana banjir jangka pendek (Cipta, Kompas 2021). Ia menyampaikan bahwa penanganan bencana banjir yang perlu dilakukan saat ini adalah pengerukan Sungai Kapuas. Karena muara Sungai Kapuas sudah tinggal 4,6 meter dan tak dikeruk lebih dari tiga tahun. Padahal jika dikeruk bisa mencapai 6 meter.

Kritikan juga disampaikan Kepala BPBD Kabupaten Sintang Bernhad Saragih, dalam wawancara dengan peneliti, ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang tidak dapat berbuat banyak terkait dengan pembangunan geobag. Dalam pemahamannya, geobag dipasang ditepian laut, bukan ditepi sungai. Apalagi ada banyak anak sungai yang menjadi jalur air masuk ke darat. Belum lagi rencana pemasangan geobag sepanjang 1,5 km tersebut berpotensi menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat, termasuk kerusakan bantaran sungai yang kondisi saat ini sudah tipis. Dan terbukti pada februari 2022 yang lalu, salah satu geobag yang dipasangan mengalami longsor (Cipta, Kompas 2022).

Bahkan pada akhir tahun 2022 ini, bencana banjir kembali melanda Kabupaten Sintang. Kondisi ini yang kemudian membuat banyak pihak menyoroti keberadaan geobag yang dianggap tidak efektif dan hanya menghabiskan anggaran. Mengutip pemberitaan media Kalbar Online (2022), Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyampaikan kekecewaannya terkait dengan gagalnya kebijakan Kementerian PUPR yang gagal menahan bencana banjir di sejumlah kawasan sungai di Kabupaten Sintang. Ia juga menyatakan bahwa seharusnya Pemerintah Pusat mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah yang dinilai lebih paham kondisi kewilayahannya. Turut disampaikan juga masalah pengerukan sungai yang menjadi tugas dari Pemerintah Pusat, karena jika solusi pengerukan itu tidak segera diambil, maka air akan terus tergenang karena tidak ada tempat dan tumpah menjadi banjir.

Menyadari rusaknya lingkungan Kalimantan Barat menjadi salah satu pemicu risiko dampak bencana bukanlah suatu hal yang istimewa. Hal yang perlu dilakukan adalah mengambil kebijakan nyata untuk mencegah agar tak terjadi kerusakan yang lebih luas dan melakukan perbaikan pada area yang mengalami kerusakan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Barat Nicodemus Ale. Walaupun mengamini pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut banjir di Sintang,

Kalimantan Barat diakibatkan oleh kerusakan lingkungan berpuluh-puluh tahun, namun yang perlu dilakukan adalah membuat upaya-upaya konkret dalam mengurangi dan memperbaiki lingkungan yang telah rusak.

Hingga saat ini sebenarnya belum terlihat *grand design* pencegahan banjir di Kabupaten Sintang, dan Kalimantan Barat pada umumnya. Bahkan pernyataan pemerintah melalui Menteri PUPR yang menyatakan bahwa pemerintah akan menyusun masterplan penanganan banjir wilayah Sungai Kapuas dan Melawi, termasuk mengeruk dan merehabilitasi danau-danau (*retarding basin*) juga belum ada kepastian. Kondisi terbaru pada akhir 2022, bencana banjir masih terus terjadi di Kabupaten Sintang. Bahkan di wilayah Kecamatan Ambalau dan Serawai banjir mencapai ketinggian 2 meter.

Pada level pemerintah daerah, upaya pencegahan juga cenderung berjalan sendiri. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sintang, sebenarnya ada program Pemantapan dan Pengembangan Sistem pengendalian banjir dan pengamanan sungai, yang terdiri atas; 1) perlindungan daerah tangkapan air (*Hulu DAS* yang ada di seluruh kecamatan); 2) normalisasi sungai; 3) perbaikan drainase; 4) pembangunan tanggul pada sungai yang rawan banjir dan longsor; 5) pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir; dan 6) revitalisasi Sungai atau danau atau mata air. Namun program tersebut hanya dijalankan beberapa pihak tanpa adanya kerja sama dan kolaborasi.

Terkait dengan normalisasi sungai sudah ada dilakukan. Namun hanya sungai-sungai kecil melalui program dana aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Sintang yang dikerjakan Dinas PU Kabupaten Sintang. Terkait dengan sosialisasi dan edikasi, BPBD Kabupaten Sintang secara rutin menyampaikan pada masyarakat sejumlah upaya pencegahan bencana banjir. Termasuk pembuatan dan penataan sistem drainase yang harus dituntaskan Dinas Perumahan dan Permukiman pada setiap Kecamatan dan juga kawasan perumahan di Kabupaten Sintang. Pemkab Sintang juga masih menunggu realisasi rencana Pemerintah Pusat yang akan membenahi daerah tangkapan air, dan juga pembangunan infrastruktur pengendali banjir.

Aspek mitigasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sintang melalui BPBD Kabupaten Sintang juga melibatkan pemerintah daerah lain. Kepala BPBD Kabupaten Sintang mengatakan bahwa BPBD se-Kalimantan Barat memiliki *group Whatsapp* (WA) yang digunakan sebagai wadah pertukaran informasi, terutama terkait dengan kondisi tinggi air sehingga BPBD Kabupaten Sintang dapat mengantisipasi akan datangnya air. Pada level pemerintah daerah sejauh ini belum ada kolaborasi nyata karena lebih

disibukkan dalam penyelesaian masalah banjir dimasing-masing daerah.

Aspek pencegahan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir lagi seperti bekerja sama memperbaiki hal yang menyebabkan banjir sebenarnya sudah termasuk dalam bentuk kebijakan diskresi. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji sudah memanggil para bupati beberapa kali ke Pontianak untuk memberikan solusi kebijakan. Misalnya ada yang mengurus izin pertanahan sudah tidak boleh lagi, kita benahi lahan kritis dan tidak membuka lahan baru. Jadi perusahaan yang bergerak sekarang adalah perusahaan yang sebelumnya sudah terlanjur diberi izin dengan catatan semuaperusahaan mengurangi resiko banjirnya dengan dibuat embung dan saluran pembuangannya harus jelas.

Dalam upaya mitigasi, BPBD Kabupaten Sintang juga berkoordinasi dengan pihak BMKG untuk memantau prakiraan cuaca di Kabupaten Sintang yang dijadikan dasar pengambilan kebijakan sampai pada level kecamatan. Kemudian ketika terjadi banjir atau bencana di wilayah tersebut maka akan di buatkan status siaga darurat banjir/bencana dan juga selalu di lakukan pemantauan oleh BMKG. Selanjutnya ketika wilayah tersebut sudah rawan bencana atau terjadinya bencana maka akan dinaikan statusmenjadi tanggap darurat dengan melalui beberapa prosedur terlebih dahulu. Dengan dinaikan menjadi tanggap darurat bencana tersebut maka mulai menerbitkan satuan tugaspenanganan banjir/bencana lainnya. Dalam satuan tugas itu, semuanya dilibatkan baik pemerintah daerah, TNI/Polri, Basarnas, maupun elemen pendukung lainnya. Kemudian tim-tim satuan tersebut di bagi dengan berbagai tugas dengan lokasi atau titik-titik banjir yang berbeda sesuai dengan daerah-daerah yang terdampak dan kemudian melakukan tugas serta fungsi yang telah di tetapkan.

Sedangkan terkait dengan sistem peringatan dini, BPBD Kabupaten Sintang dan BMKG berencana untuk mengembangkan sistem untuk dapat memantau ketinggian air yang dipasang disejumlah jembatan. Data tersebut yang akan menjadi dasar penentuan status bencana banjir di Kabupaten Sintang, karena sejauh ini laporan tersebut masih dikerjakan secara manual berdasarkan foto-foto yang disampaikan pihak desa dan kecamatan.

3. Dampak Bancana banjir Kabupaten Sintang Tahun 2021

a) Dampak Pengaruh Kesehatan

Kondisi demografis masyarakat yang terdampak banjir mencakup mereka yang tinggal di tenda pengungsian serta yang mencari perlindungan di tempat saudara saat

terjadi banjir di Kecamatan Sintang. Dalam Konteks Kesehatan masyarakat tidak dapat mengunjungi tempat tempat pelayanan kesehatan dikarenakan akses yang tidak bisa dilalui. Penyakit kulit dan diare paling banyak di derita oleh masyarakat, hal ini disebabkan oleh campuran air banjir dengan air sungai yang mengandung bakteri. Walaupun demikian, pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas diakui oleh masyarakat sebagai bantuan yang berarti dalam penyembuhan dan pemulihan kesehatan mereka dengan melakukan Pusling menggunakan perahu/ serta posko –posko darurat yang didirikan.

Dalam konteks pendidikan, Di Kecamatan Sintang, saat terjadi banjir, sekolah diliburkan selama beberapa hari. Beberapa sekolah dijadikan tempat pengungsian dan sebagian terendam banjir sehingga tidak dapat digunakan. Namun, setelahnya, pemerintah dengan sigap mengeluarkan kebijakan untuk sekolah dapat melakukan pembelajaran melalui Daring sehingga proses belajar dan pengajaran dapat berlanjut. Ini adalah upaya untuk mewujudkan pendidikan yang tidak terhambat dan tetap memberi kesempatan bagi para pelajar untuk mengembangkan potensi mereka.

Dalam konteks kondisi rumah, selain sandang dan pangan, rumah juga merupakan kebutuhan dasar. Kondisi rumah diukur dengan mengevaluasi tingkat kerusakan fisik rumah, seperti atap, dinding, lantai, kamar mandi, dan WC. Mayoritas rumah masyarakat di Kecamatan Sintang mengalami rusak akibat terendam banjir dengan kedalaman 1 – 3 meter. Selain rumah- rumah penduduk, beberapa bangunan penting seperti sekolah, mushola, puskesmas, jembatan, sarana air bersih juga banyak yang tidak dapat difungsikan sebagai mana mestinya.

b) Dampak Pengaruh Lingkungan Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat adalah aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan dalam periode minimal satu jam dalam satu minggu secara berkelanjutan, termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang berkontribusi dalam usaha ekonomi (Imas Karunia, 2012). Aktivitas pekerjaan menjadi terhambat oleh banjir yang besar, mengakibatkan penurunan pendapatan ekonomi. Pemerintah setempat berusaha memberikan bantuan, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya, untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Pendapatan masyarakat terdampak banjir bandang cenderung menurun karena akses terputus saat terjadi banjir. Hal ini mengakibatkan masyarakat melakukan segala upaya untuk tetap mendapatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan. Bantuan yang diterima oleh masyarakat tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga barang seperti

sembako. Namun, jangka waktu penerimaan bantuan tidak pasti.

c) Dampak Perubahan Lingkungan dari Bencana Kecamatan Sintang

Bencana banjir pada November 2021 berdampak signifikan terhadap lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat Kecamatan Sintang, terutama bagi mereka yang terkena dampak banjir di Kecamatan Sintang. Dampak perubahan lingkungan ini tidak hanya terlihat dalam dimensi fisik, tetapi juga mempengaruhi aspek-aspek non-fisik seperti perubahan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Perubahan dalam aspek sosial dapat diamati dari beberapa perspektif. **Pertama**, dampak bencana banjir menyebabkan perubahan dalam tata ruang wilayah, terutama dalam wilayah yang menjadi pemukiman baru setelah bencana banjir. Prioritas sekarang adalah tenda pengungsian dan pemenuhan kebutuhan makanan dan tempat tinggal, karena banyak rumah masyarakat terendam banjir. **Kedua**, hubungan sosial dan kekerabatan antarindividu dan tetangga mengalami perubahan. **Ketiga**, proses pendidikan terganggu dan berdampak pada prestasi siswa karena sarana pendidikan yang kurang memadai. **Keempat**, status sosial masyarakat mengalami perubahan. **Kelima**, sikap masyarakat menjadi lebih peduli, terlihat dari banyaknya bantuan yang diberikan oleh masyarakat kepada korban bencana banjir baik dalam bentuk organisasi maupun individu.

Selanjutnya, perubahan dalam aspek ekonomi juga terlihat jelas. Mata pencaharian masyarakat menjadi lebih beragam, termasuk sebagai petani, buruh bangunan, pedagang sayur dan buah, pengemudi ojek, penjual sembako, dan pekerja di bidang jasa lainnya. Diversifikasi pekerjaan ini berdampak pada pendapatan, pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyebab Banjir di Kabupaten Sintang tahun 2021, Selain karena tingginya curah hujan, banjir yang terjadi juga disebabkan rusaknya kondisi lingkungan sehingga kawasan penyangga dan daerah resapan air tidak dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal. Hal tersebut terjadi karena tingginya alih fungsi hutan di Kalimantan Barat, termasuk di Kabupaten Sintang. Baik itu beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan, dan juga maraknya aktivitas penambangan ilegal (PETI). Bahkan dalam 2020 saja, Kalimantan Barat telah kehilangan 32.000 hektar hutan primer setara 23 juta ton emisi CO₂.

Kolaborasi yang terjadi dalam penanggulangan dan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Sintang dilakukan oleh lintas organisasi perangkat daerah, termasuk Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Pusat dan juga melibatkan pihak swasta. Pada level Pemerintah Kabupaten Sintang, OPD yang terlibat diantaranya BPBD Kabupaten Sintang, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dinas Sosial Kabupaten Sintang, Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Dinas PUPR, sedangkan Lembaga vertikal ada BMKG Kabupaten Sintang, Basarnas, dan juga TNI/Polri.

Secara keseluruhan kolaborasi pemerintah dalam penanganan banjir di Kabupaten Sintang dapat dikatakan sudah maksimal, terutama dalam upaya pemenuhan kebutuhan korban banjir, dan juga dalam perbaikan infrastruktur. Namun ada beberapa catatan yang menjadi perhatian dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Sintang, terutama terkait dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR yang memutuskan membangun geobag yang ternyata tidak menjadi solusi banjir di Kabupaten Sintang. Terbukti, pada akhir 2022 ini, bencana banjir masih terjadi di kawasan yang dibangun geobag atau geotube.

Berbagai dampak akibat banjir besar tahun 2021 di Kabupaten Sintang menjadi permasalahan yang cukup serius. Banjir dengan kedalaman 1- 3 meter banyak mengakibatkan layanan- layanan publik tidak berfungsi. Berbagai dampak yang dirasakan dampak lingkungan social dan kesehatan, dampak lingkungan ekonomi dan perubahan lingkungan akibat banjir itu sendiri.

DAFTAR REFERENSI

- Ade. (2021, November 21). Harian Property. Retrieved November 18, 2022, from <https://www.harianproperty.com/Terkini/details/3490/Tinjau-Banjir-di-Sintang-dan-Melawi-Menteri-Basuki-Siapkan-Penanganan-Jangka-Pendek-dan-Panjang>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 544-571.
- Cipta, H. (2021, November 24). Kompas. Retrieved November 16, 2022, from <https://regional.kompas.com/read/2021/11/24/113424378/banjir-di-sintang-kalbar-jadi-yang-terbesar-dan-terlama-sejak-1963?page=all>
- Cipta, H. (2022, Februari 2). Kompas. Retrieved November 18, 2022, from <https://regional.kompas.com/read/2022/02/02/163830578/geobag-yang-dibangun-untuk-tahan-banjir-di-sintang-kalbar-jebol?page=al>
- Ferryanto. (2021, November 25). Metropolis. Retrieved from *Tribun Pontianak*: <https://pontianak.tribunnews.com/2021/11/25/aliansi-aksi-perlawanan-untuk-keadilan-iklim-kalbar-nilai-banjir-akibat-ekstraksi-sumber-daya-massif>
- Harahap, R. (2019). Pekerjaan drainase dan penyebab banjir lingkungan permukiman. *Seminar Nasional Teknik UISU*, 5–9.
- Hermawan, D. (2020). Banjir jadi momok di Medan setiap hujan, ini saran untuk Memko

- Medan. Idntimes.Com. <https://sumut.idntimes.com/news/sumut/doni-hermawan-1/banjir-jadi-momok-di-medan-setiap-hujan-ini-saran-untuk-pemko-medan/4>
- Jamadin. (2021, November 23). Sintang. Retrieved from Tribun Sintang: <https://pontianak.tribunnews.com/2021/11/27/pembangunan-geobag-pupr-tuai-pro-dan-kontra-bpbd-minta-kaji-pemasangan>
- Pahlevi, A. (2021, Oktober 31). Mongabay. Retrieved November 16, 2022, from <https://www.mongabay.co.id/2021/10/31/dua-dekade-terakhir-kalimantan-barat-kehilangan-125-juta-hektar-hutan/>
- Pratama, P. Y., & Nurmandi, A. (2020). Collaborative governance dan social capital: Peran pemerintah dan non-pemerintah dalam disaster management di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Tata Sejuta*, 6(1), 35–50. <http://ejournalstiamataram.ac.id/index.php/tatasejuta/article/view/102>
- Putri, I. A. P. (2019). Kapasitas pemerintah Provinsi Jambi dalam menghadapi bencana banjir dan asap akibat kebakaran hutan dan lahan. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 14(1), 61–76.
- Ramdhani, J. (2021, November 16). Berita. Retrieved from Detik: <https://news.detik.com/berita/d-5813484/4-pekan-12-kecamatan-di-sintang-masih-banjir-124497-warga-terdampak>
- Rosyadi, D. (2021, November 21). Kabinet. Retrieved from Suara Pemerintah: <https://suarapemerintah.id/2021/11/menteri-basuki-siapkan-penanganan-banjir-di-sintang-dan-melawi/>
- Ruhlessin, M. F. (2021, November 21). Properti. Retrieved from Kompas: <https://www.kompas.com/properti/read/2021/11/23/163000921/sutarmidji-tak-setuju-rencana-basuki-bangun-geobag-atasi-banjir-di>
- Santia, T. (2021, November 17). Bisnis. Retrieved from Liputan 6: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4712704/top-3-jokowi-bongkar-penyebab-banjir-sintang>
- Santoso, S. B. (2021, Desember 7). Kalbar Terkini. Retrieved November 16, 2022, from <https://kalbarterkini.pikiran-rakyat.com/kalbar/pr-1633175911/dedi-mulyadi-murka-sikapi-banjir-sintang-pemerintah-lalai-atasi-masalah-lingkungan-eksak-kalah-lawan-politik>
- Sari, A. D. K. (2019). Atasi banjir di Medan, gubernur siapkan relokasi. *Bisnis.Com*. <https://sumatra.bisnis.com/read/20191222/533/1183812/atasi-https://doi.org/10.1080/09644016.2012.683155>